



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH (BRIDA)
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan

H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Renstra BRIDA ini merupakan cerminan apa yang akan dilakukan oleh Brida 5 (Lima) tahun ke depan. Renstra BRIDA merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (Lima) tahunan yang menjadi komitmen untuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2029.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Harapan kami, Renstra ini dapat menjadi pedoman kerja yang efektif dan berkelanjutan dan berkontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang, 26 September 2025

Plt. Kepala Badan,



Dr. Basyaruddin Akhmad, M.Sc
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197008041994031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI.....II

DAFTAR TABEL.....IV

Tabel 2.....IV

Tabel 3.....IV

Tabel 4.....IV

DAFTAR GAMBAR V

DAFTAR LAMPIRAN..... VI

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan2

1.3 Maksud dan Tujuan.....4

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah4

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra OPD :.....4

1.4 Sistematika Penulisan.....5

BAB II 7

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 7

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah7

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah7

2.1.2 Sumber Daya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)12

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan14

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah20

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan21



2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja.....	22
2.1.7 Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah.....	22
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	24
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	24
2.2.2 Isu Strategis.....	24
BAB III	34
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	34
3.1 Tujuan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.....	34
3.2 Sasaran.....	34
3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	36
3.4 Penahapan Pembangunan.....	38
3.5 Penyajian Lokus.....	40
3.6 Arah Kebijakan Badan Riset Dan Inovasi Provinsi Sumatera Selatan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029	40
BAB IV	45
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	45
4.1 Uraian Program.....	45
4.2 Uraian Program.....	48
4.3 Uraian Sub Kegiatan	49
4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	90
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan.	95
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97
BAB V	100
PENUTUP	100



DAFTAR TABEL

Tabel 2

Tabel. 2 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah16

Tabel. 2 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah19

Tabel. 2 3 (Inmen 2/2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah27

Tabel 3

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BRIDA Provinsi Sumatera Selatan35

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD39

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan41

Tabel 4

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan57

Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan76

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah93

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan96

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi BRIDA.....11

Gambar 2. 2 Jumlah SDM Brida Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 202512

Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai BRIDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....13

Gambar 2. 4 Pegawai Brida Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Komposisi Jenis Kelamin Tahun 2025.....13

Gambar 2. 5 Komposisi Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Fungsional14

Gambar 2. 6 Data Aset Tetap BRIDA Tahun 2025.....14

Gambar 2. 7 Bagan Hubungan Kemitraan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....21

Gambar 2. 8 Bagan Hubungan Kemitraan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.....22



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lampiran Tabel Rincian Komponen Belanja Rancangan Akhir
Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2025-2030.....103

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (P-RPJPD), Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Tahun 2025-2025, mengamanatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. Merupakan satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional;
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

Rencana pembangunan Daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD dan RKPD. Sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat: pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan, kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengetustamaan Gender di Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gbernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 000.7.2.2/060/SE/Bappeda/2025 Tentang Pedoman Penyempurnaan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Maksud penyusunan Renstra OPD (Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah) adalah memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD selama periode 5 (lima) tahun, agar sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Secara lebih rinci, maksud penyusunan Renstra OPD antara lain :

- **Menyelaraskan Perencanaan**, Menjadi dokumen perencanaan menengah OPD yang sinkron dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD) dan nasional (RPJMN/RKP).
- **Memberikan Arah Strategis**, Menjadi acuan OPD dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- **Menjadi Pedoman Operasional**, Menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) dan RKA OPD.
- **Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi**, Mendorong penggunaan sumber daya (SDM, anggaran, sarana-prasarana) secara optimal sesuai prioritas pembangunan.
- **Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja**, Menjadi instrumen akuntabilitas yang dapat diukur pencapaiannya melalui indikator kinerja OPD, serta menjadi dasar penyusunan LKjIP.
- **Menjamin Kestinambungan Pembangunan**, Menjadi alat pengendali agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai target pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan penyusunan Renstra OPD :

- **Menjabarkan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Kepala Daerah**, Renstra OPD disusun untuk memastikan setiap perangkat daerah memiliki arah dan strategi yang selaras dengan RPJMD, sehingga kontribusi OPD jelas terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.
- **Menjadi Acuan Perencanaan Dan Penganggaran**, Renstra OPD menjadi dasar dalam penyusunan Renja OPD, RKA, serta dokumen

perencanaan tahunan lainnya, sehingga program dan kegiatan lebih terarah dan terukur.

- **Meningkatkan Kinerja OPD**, Dengan adanya sasaran strategis, indikator kinerja, serta target yang jelas, Renstra mendorong peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
- **Mendukung Integrasi Perencanaan Pembangunan**, Renstra OPD berperan untuk menyinergikan perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional serta kebijakan lintas sektor.
- **Menjadi Dasar Evaluasi Dan Pengendalian**, Renstra OPD memudahkan monitoring, evaluasi, serta pengendalian pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat dilakukan perbaikan strategi apabila terdapat deviasi dari target.
- **Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**, Renstra menjadi instrumen utama untuk mengukur pencapaian kinerja OPD yang kemudian dilaporkan melalui LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berisi visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah, Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja, Kerja Sama Daerah yang menjadi Tanggung Jawab PD, Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah dan Isu Strategis.

Bab III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat Tujuan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029, Sasaran Perangkat Daerah Provinsi Tahun RENSTRA 2025-2029, Strategi Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-

2029, Arah Kebijakan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029.

Bab IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Sub kegiatan, Uraian Sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah, Target Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Bab V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) adalah salah satu perangkat daerah di Propinsi Sumatera Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Untuk susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi perangkat daerah BRIDA berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Brida merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas begai unsur penunjang pemerintah daerah di bidang Riset dan Inovasi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Badan Riset dan Inovasi Daerah

2.1.1.1 KEPALA BADAN

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Riset dan Inovasi serta Invensi dan Inovasi di Provinsi secara menyeluruh dan berkelanjutan dan melaksanakan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan provinsi di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di provinsi yang berpedomaan pada nilai Pancasila;

- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta Inovasi dan inovasi di Provinsi;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitian dan Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Provinsi;
- e. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Provinsi;
- f. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
- g. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Provinsi;
- h. Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
- i. Pelaksanaan administrasi badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.2 SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Provinsi yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengkoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
- c. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- d. Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan,

keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;

- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.2.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset;
- b. Melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset;
- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam perlengkapan dan pengelolaan aset;
- d. Melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- e. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.2.2 Substansi Program, yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Provinsi yang berpedoman pada nilai Pancasila; dan
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.2.3 Substansi Keuangan, yang mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset; dan
- b. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan,

2.1.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana Lainnya :

- 1. Substansi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan Ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi, yang mempunyai tugas:
 - a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan

- pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di Provinsi;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, Penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi;
 - e. Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi; dan
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
2. Substansi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian inovasi dan inovasi di Provinsi, yang mempunyai tugas :
- a. Pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Inovasi dan Inovasi di Provinsi yang memperkuat fungsi dan kedudukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Inovasi dan Inovasi, kerjasama Inovasi dan Inovasi, serta kemitraan Inovasi dan Inovasi di Provinsi;
 - c. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Inovasi dan Inovasi, kerjasama Inovasi dan Inovasi, serta kemitraan Inovasi dan Inovasi di Provinsi;
 - d. Pemantauan dan evaluasi Inovasi dan Inovasi di Provinsi;
 - e. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, Pengelolaan dan Pemanfaatan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi;
 - f. Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Provinsi; dan

- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.1.4 UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

UPTB dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota dan UPTB yang terdapat dibawah BRIDA adalah **UPTB Science Techo Park** dan **UPTB Kebun Raya Sriwijaya**.

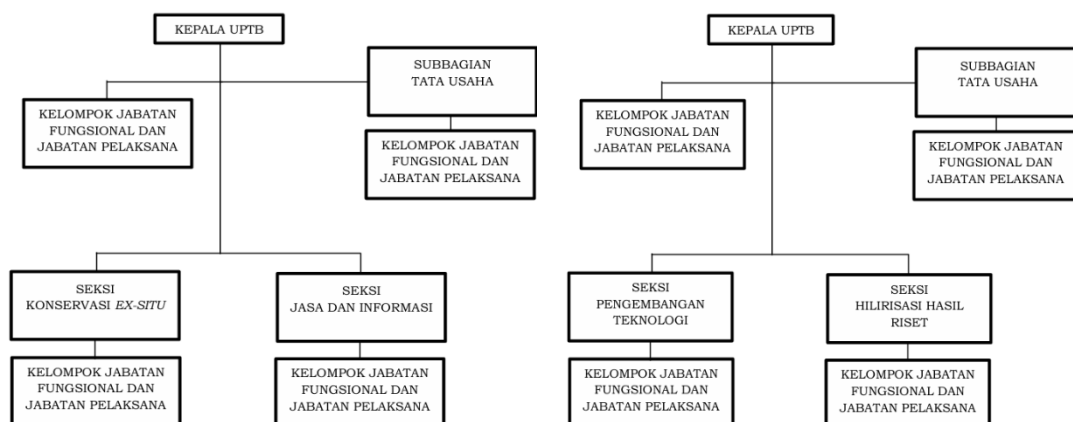
Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi BRIDA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



Bagan Susunan Organisasi UPTB KRS dan STP



Struktur Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari:

- Kepala Badan
- Sekretariat, membawahi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 - Sub Bag Umum dan Kepegawaian
- Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

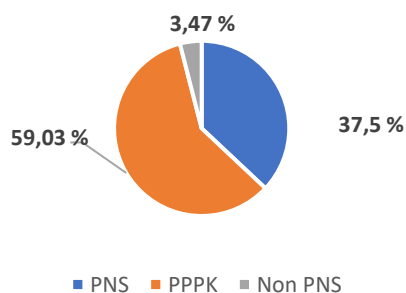
- d. Unit Pelaksana Teknis Badan; UPTB KRS dan UPTB STP
 1. UPTB Kebun Raya Sriwijaya (KRS)
 - a. Kepala UPTB KRS
 - b. Kasubbag Tata Usaha UPTB KRS
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi
 - d. Seksi Jasa dan Informasi
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
 2. UPTB Science Techno Park (STP)
 - a. Kepala UPTB STP
 - b. Kasubbag Tata Usaha UPTB STP
 - c. Seksi Pengembangan Teknologi
 - d. Seksi Hilirisasi Hasil Riset
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

2.1.2 Sumber Daya Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

- a. Jumlah SDM Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 144 orang terdiri dari 37,5 % berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 59,03 % berstatus pegawai PPPK tersebar di Brida dan UPTB serta 3,47 % berstatus pegawai non-ASN.

Gambar 2. 2 Jumlah SDM Brida Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2025

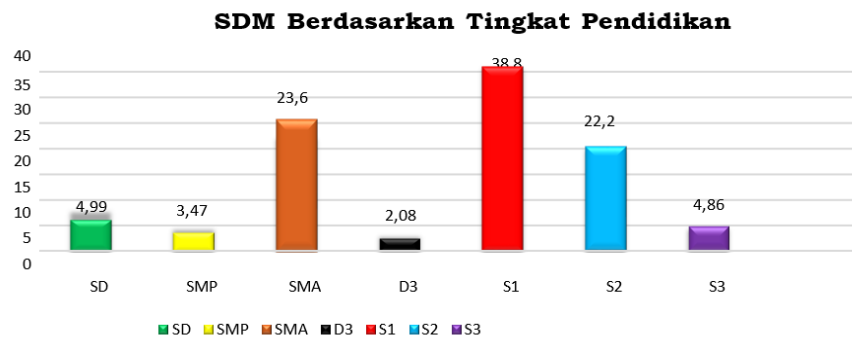
SDM berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

- b. Tingkat pendidikan Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagian besar lulusan Strata 1 (S1) yaitu 38,8 %, Strata 2 (S2) yaitu 22,2%, sedangkan minoritas lulusan Strata 3 (S3) hanya 4,86%.

Gambar 2. 3 Jumlah Pegawai BRIDA Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

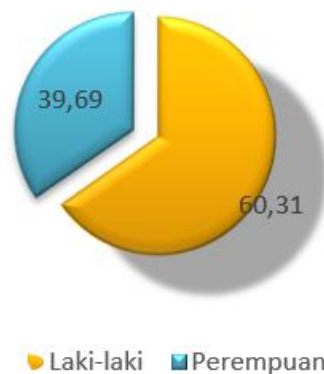


Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

- c. Komposisi Pegawai BRIDA Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan jenis kelamin : Laki-laki 81 orang (60,31%), dan perempuan berjumlah 63 orang (39,69 %).

Gambar 2. 4 Pegawai Brida Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Komposisi Jenis Kelamin Tahun 2025

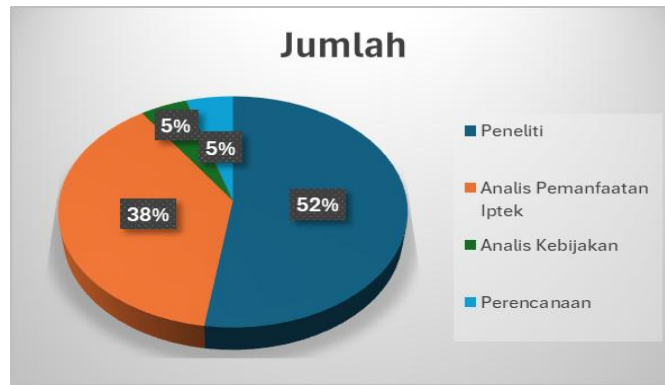
SDM Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

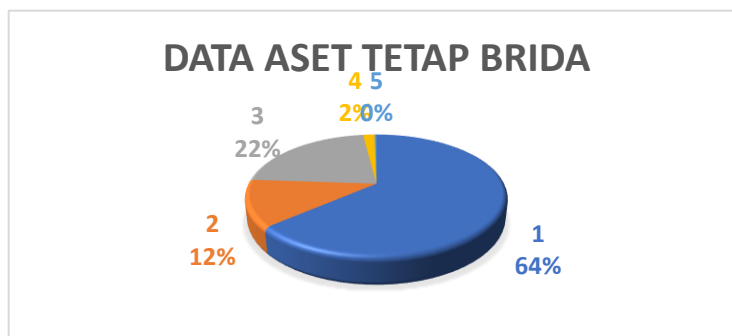
- d. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sebagian besar Fungsional yaitu Peneliti 11 Orang, Analis Pemanfaatan Iptek (8 Orang), Analis Kebijakan (1) dan Perencana (1 Orang).

Gambar 2.5 Komposisi Pegawai Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jabatan Fungsional



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

Gambar 2. 6 Data Aset Tetap BRIDA Tahun 2025



Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian, Juli 2025

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan

Pada tahun 2020-2025 Perangkat Daerah yang menangani urusan Penelitian dan Pengembangan adalah **Badan penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.**

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. **Maka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menggunakan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.**

Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Provinsi.

Pada tahun 2020-2024, kinerja pelayanan Perangkat Daerah masih merupakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Provinsi Sumatera Selatan yang menunjukkan tingkat kinerja pelayanan yang baik yaitu pada tahun 2020 nilai SAKIP Balitbangda Prov. Sumsel adalah 67.60 (B), tahun 2021 nilai SAKIP Balitbangda Prov. Sumsel adalah 74.74 (BB), tahun 2022 nilai SAKIP Balitbangda Prov. Sumsel adalah 74.74 (BB), tahun 2023 nilai SAKIP Balitbangda Prov. Sumsel adalah 88.62 (A), tahun 2024 nilai SAKIP Balitbangda Prov. Sumsel adalah 88.29 (A).

Keberadaan Balitbangda Prov. Sumsel diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi dan inovasi yang dapat digunakan untuk mendukung Perangkat Daerah Provinsi Sumsel dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan kebutuhan – kebutuhan pelaku usaha/dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Inovasi yang sudah dihasilkan oleh Pemerintah Prov. Sumsel mengalami peningkatan.

A. Capaian Kinerja Pelayanan Balitbangda Prov. Sumsel

Bila dilihat dari capaian kinerja berdasarkan Target Renstra Tingkat capaian kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan pada periode Renstra sebelumnya (2024-2026), dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dengan kinerja yang ditargetkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang ditargetkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Balitbangda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama.

Data pencapaian kinerja Pelayanan Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan.



Tabel. 2 1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16=11/6)	(17=12/7)	(18=13/8)	(19=14/9)	(20=15/10)
1	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	8,5	24.100	24.200	24.500	83,29	78,82	79,51	79,47	83,28	75,79	9,27	na	na	na	0,91
2	1. Jumlah Hasil penelitian dan Pengembangan	-	-	-	62	69	76	83	0	62	69	22	77	0	1,00	1,00	0,29	0,93	0,00
	2. Jumlah Desa Inovasi	-	-	-	17	1	1	1	0	1	2	1	0	0	0,06	2,00	1,00	0,00	0,00
3	1. Nilai Ekosistem Inovasi	-	-	-	3	3	4,2	4,5	2,72	5	4	0	0	3,25	1,67	1,33	0,00	0	1,19
	2. Persentase Kab/Kota yang Mengimplementasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	-	-	-	0	0	0	0	76%	0	0	0	0	76%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	3. Persentase Jenis Komoditi Unggulan yang memiliki Klaster Inovasi	-	-	-	0	0	0	0	40%	0	0	0	0	40%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	4. Persentase OPD yang bekerjasama dalam pilot project pengembangan SIDA	-	-	-	0	0	0	0	35%	0	0	0	0	35%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	5. Persentase peningkatan PKS/MoU	-	-	-	0	0	0	0	65%	0	0	0	0	35%	0,00	0,00	0,00	0	54%
	6. Persentase peningkatan program kegiatan bersinergi	-	-	-	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	7. Persentase klister inovasi yang memiliki dukungan kebijakan (dukungan SDM, dana dan sarpras)	-	-	-	0	0	0	0	33%	0	0	0	0	33%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	8. Persentase OPD yang memiliki inovasi pelayanan	-	-	-	0	0	0	0	73%	0	0	0	0	73%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	9. Persentase OPD yang memiliki SDM Pelayanan Publik berkompeten	-	-	-	0	0	0	0	50%	0	0	0	0	50%	0,00	0,00	0,00	0	100%
	10. Persentase inovasi yang didukung oleh regulasi	-	-	-	0	0	0	0	100%	0	0	0	0	100%	0,00	0,00	0,00	0	100%



NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16=11/6)	(17=12/7)	(18=13/8)	(19=14/9)	(20=15/10)
4	Jumlah prototype yang memenuhi TRL	-	-	-	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0	0
5	1. Jumlah pemakalah dipertemuan ilmiah terindeks global	-	-	-	2	3	2	0	0	3	3	2	0	0	1,50	1,00	1,00	0	0
	2. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	-	-	-	1	2	3	4	0	1	2	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0	0
	3. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah terindeks global	-	-	-	1	2	3	0	0	3	3	0	0	0	3,00	1,50	0,00	0	0
	4. Jumlah Buku Ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal	-	-	-	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	1,00	1,00	1,00	0	0
	5. Jumlah pemakalah dipertemuan ilmiah eksternal instansi	-	-	-	14	15	3	0	0	7	15	3	0	0	0,50	1,00	1,00	0	0
	6. KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	-	-	-	10	12	1	0	0	3	12	1	0	0	0,30	1,00	1,00	0	0
	7. Jumlah KTI diterbitkan di prosiding ilmiah nasional	-	-	-	2	3	4	0	0	0	3	1	0	0	0,00	1,00	0,25	0	0
	8. Jumlah buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal ilmiah eksternal instansi	-	-	-	1	2	0	0	0	0	2	3	0	0	0,00	1,00	0,00	0	0
6	1. Jumlah pemakalah dipertemuan ilmiah terindeks global	-	-	-	1	2	3	0	0	7	2	3	0	0	7,00	1,00	1,00	0	0
	2. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi	-	-	-	1	2	1	0	0	6	2	1	0	0	6,00	1,00	1,00	0	0
	3. Jumlah KTI diterbitkan di ilmiah terindeks global	-	-	-	1	2	4	0	0	8	2	4	0	0	8,00	1,00	1,00	0	0
	4. Jumlah Buku Ilmiah diterbitkan oleh penerbit eksternal				0	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0,00	1,00	1,00	0	0
	5. Jumlah Pemakalah dipertemuan ilmiah eksternal instansi	-	-	-	11	12	1	0	0	2	12	1	0	0	0,18	1,00	1,00	0	0
	6. Jumlah KTI diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi nasional	-	-	-	2	3	0	0	0	2	3	0	0	0	1,00	1,00	0,00	0	0
	7. Jumlah KTI diterbitkan di Prosiding ilmiah nasional	-	-	-	1	2	3	4	0	1	2	1	0	0	1,00	1,00	0,33	0	0
	8. Jumlah buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internal	-	-	-	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

Rasio capaian kinerja dari tahun 2020-2024 memberikan data yang berbeda karena target capaian dan realisasi target berbeda-beda setiap tahunnya karena data ini berasal dari Kementerian Dalam Negeri karena perbedaan mendasar pada metodologi penilaian yang berubah karena kebijakan yang terus berkembang serta adanya perubahan sistem sebelumnya. Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan adalah **Juara 2 Tingkat Nasional Kategori, Provinsi Sangat Inovatif**, Tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan adalah **Juara 1 Tingkat Nasional Kategori Provinsi Sangat Inovatif**, Tahun 2022 Provinsi Sumatera Selatan adalah **Juara 1 Tingkat Nasional, Kategori Provinsi Sangat Inovatif**, Tahun 2023 Provinsi Sumatera adalah **Juara 1 Tingkat Nasional, Kategori Provinsi Sangat Inovatif**, Tahun 2024 Provinsi Sumatera adalah **Juara 5 Tingkat Nasional, Kategori Provinsi Sangat Inovatif**, penurunan skor Indeks dikarenakan Kemendagri merubah kategori penilaian bahwa Nilai Indeks Kab/Kota yang ada di Sumatera Selatan akan mempengaruhi nilai Indeks Provinsi.



Tabel. 2 2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Uraian		Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12=7/2)	(13= 8/3)	(14=9/4)	(15=10/5)	(16=11/6)	(17)	(18)
	Belanja Daerah	18.690.556.440	22.534.069.440	20.353.408.856	20.561.263.889	16.611.582.240	17.028.815.721	20.716.020.760	19.208.576.535	18.403.085.473	15.476.207.648	0,91	0,92	0,94	0,90	0,93	800.603.240,25	738.038.900
1	Belanja Operasi	17.844.546.440	21.184.830.440	19.630.282.030	20.170.463.889	16.256.179.640	16.182.805.721	19.752.769.760	18.576.837.349	18.318.224.473	15.124.765.048	0,91	0,93	0,95	0,91	0,93	772.417.555,99	717.725.962
	- Belanja Pegawai	10.085.785.000	9.638.938.000	10.428.952.000	10.333.282.922	10.866.790.834	8.882.107.048	8.702.415.714	9.714.767.739	9.771.295.562	9.295.667.729	0,88	0,90	0,93	0,95	0,86	412.679.633,56	374.841.463
	-Belanja Barang dan Jasa	7.758.761.440	11.545.892.440	9.201.330.030	9.837.180.967	5.389.388.806	7.300.698.673	11.050.354.046	8.862.069.610	8.546.928.911	5.829.097.319	0,94	0,96	0,96	0,87	1,08	359.737.918,43	342.884.495
2	Belanja Modal	846.010.000	1.349.239.000	723.126.826	390.800.000	355.402.600	846.010.000	963.251.000	631.739.186	84.861.000	351.442.600	1,00	0,71	0,87	0,22	0,99	28.185.680,26	20.312.934
	-Belanja Modal Peralatan dan Mesin	846.010.000	1.197.950.000	723.126.826	325.800.000	290.970.000	846.010.000	811.962.000	631.739.186	74.861.000	287.010.000	1,00	0,68	0,87	0,23	0,99	25.378.464,26	18.055.718
	-Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	99.789.000	0	40.000.000	39.582.600	0	99.789.000	0	10.000.000	39.582.600	0	1,00	0	0,25	1,00	395.824,00	395.824
	-Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	51.500.000	0	0	0	0	51.500.000	0	0	0	0	1,00	0	0	0	0,00	0
	-Belanja Modal Aset Lainnya	0	0	0	25.000.000	24.850.000	0	0	0	0	24.850.000	0	0	0	0	1,00	248.499,00	0

Secara umum rasio realisasi dan anggaran pada tahun 2020-2024 mencapai rata-rata 0,91 – 0,94 (91- 94%). Secara umum, rasio realisasi terhadap anggaran berada pada kategori baik dengan capaian di atas 0,91 pada sebagian besar tahun. Pada tahun 2022, kinerja serapan anggaran dapat dikategorikan sangat baik, dengan rasio realisasi dan anggaran mencapai 0,94 yang terdiri dari belanja pegawai 0,93, belanja barang jasa 0,96 dan belanja modal 0,87. Hal ini menunjukkan perencanaan anggaran yang realistis serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan optimal. Sementara itu, pada tahun 2023, rasio antara realisasi dan anggaran 0,90 yang terdiri dari belanja pegawai 0,95, belanja barang dan jasa 0,87 dan belanja modal 0,22 Hal ini dipengaruhi oleh adanya refocusing dan relokasi anggaran akibat pilkada serentak.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

1. Pemerintah (Government)

- Sebagai regulator, fasilitator, sekaligus motor penggerak kebijakan pembangunan.
- Menyediakan regulasi, anggaran, program, serta arah kebijakan yang jelas.

2. Akademisi (Academics)

- Memberikan dukungan keilmuan, riset, kajian, serta inovasi berbasis data dan ilmu pengetahuan.
- Menjadi mitra dalam pengembangan kapasitas SDM dan evaluasi program.

3. Dunia Usaha (Business)

- Menyediakan dukungan investasi, pembiayaan, teknologi, serta jaringan pemasaran.
- Berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja.

4. Masyarakat/Komunitas (Community)

- Menjadi pelaku utama, penerima manfaat, sekaligus pengawas sosial terhadap jalannya pembangunan.
- Memberikan dukungan berupa partisipasi aktif, aspirasi, dan inisiatif lokal.

5. Legislatif (DPRD)

Peran legislatif adalah untuk mengawasi, menyetujui dan memberikan masukan terhadap perencanaan, pelaksanaan dan realisasi anggaran yang dibuat oleh eksekutif (pemerintah daerah) untuk kesejahteraan Masyarakat.

6. Media (Media)

- Menyampaikan informasi pembangunan secara transparan kepada masyarakat.
- Menjadi sarana edukasi, kontrol sosial, sekaligus penghubung komunikasi antar pemangku kepentingan.

Gambar 2. 7 *Bagan Hubungan Kemitraan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah*

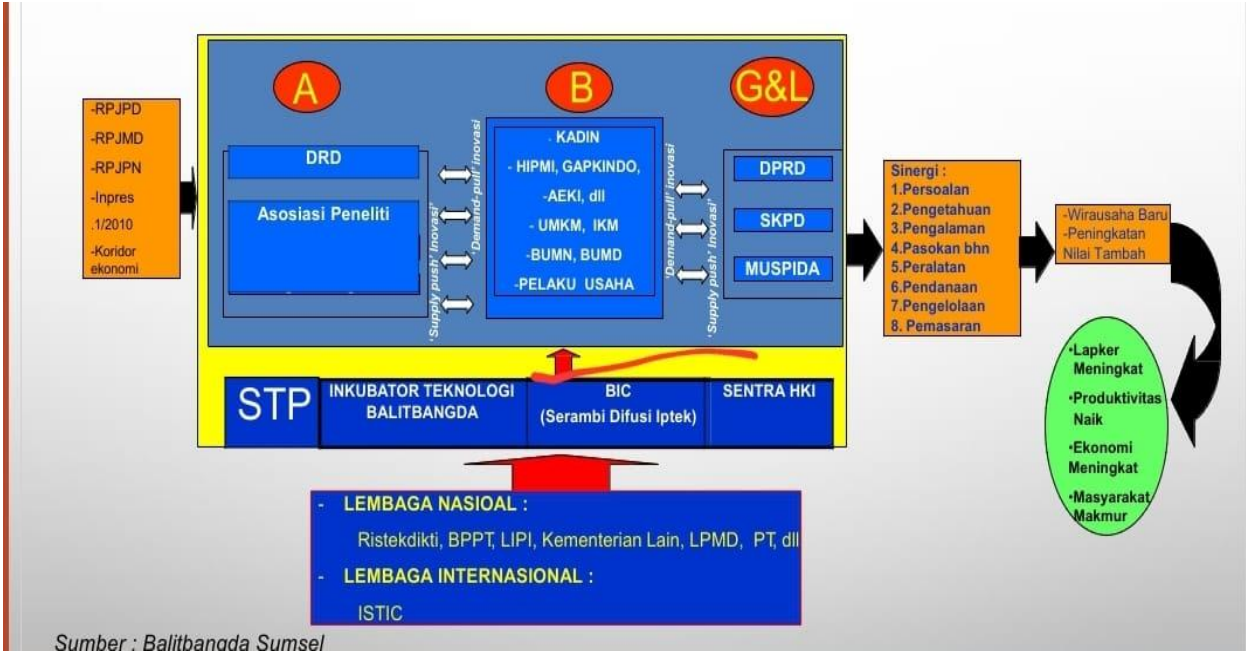


2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra perangkat daerah Balitbangda dalam memberikan pelayanan dalam bentuk dukungan dan Kerjasama adalah :

1. Kemendagri
2. Kemenpan RB
3. BAPPENAS
4. BRIN
5. Bank Indonesia
6. Instansi Vertikal Lainnya
7. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
9. Pelaku Usaha (BUMN, BUMD, Koperasi, dan UMKM)
10. Kelompok Masyarakat

Gambar 2. 8 Bagan Hubungan Kemitraan Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah



Sumber : Balitbanada Sumsel

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Balitbangda adalah :

- 1. Bank Sumsel Babel, dan
- 2. Hotel Swarna Dwipa Palembang

2.1.7 Kerjasama yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Kerjasama yang sudah dilakukan oleh Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan dalam bentuk kolaborasi dan sinergitas pelayanan publik.

No	Kerjasama yang Dihasilkan dari Fasilitasi dan Koordinasi			
	Kerjasama Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Mitra Kerjasama Penghasil Inovasi	Mitra Kerjasama Pengguna Inovasi	Bukti Dukung (Link-PKS/Berkas Kerjasama Lainnya)
1	Sinergitas Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan Inovasi Dan Inovasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Bon Cabai Merah (bubuk cabai) Di Provinsi Sumatera Selatan (2022)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	BRIN	https://drive.google.com/file/d/1VPubznPAiasFJHGtlzKG2rRdeuqUAR1s/view?usp=sharing
2	Budidaya Tanaman Pisang Cavendish (2022)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Tenant Kelompok Petani Usaha Pengganti Kampung Buah	https://drive.google.com/file/d/1S_w5sSneWCQjr8ZFus5AmPkLOzgQ5js5/view?usp=sharing



No	Kerjasama yang Dihasilkan dari Fasilitasi dan Koordinasi			
	Kerjasama Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Mitra Kerjasama Penghasil Inovasi	Mitra Kerjasama Pengguna Inovasi	Bukti Dukung (Link-PKS/Berkas Kerjasama Lainnya)
3	Budidaya Tanaman Pangan Dan Hortikutura Cabai (2022)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Tenant Kelompok Petani Kube Sriwijaya Bakung I	https://drive.google.com/file/d/1zVPmyJTfE3Q7hngl4-Cuw9nqknlyFktz/view?usp=sharing
4	Budidaya Tanaman Pangan Dan Hortikutura Bawang Merah (2022)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Tenant Kelompok Petani Kube Sriwijaya Bakung II	https://drive.google.com/file/d/1zt4ugsYErzhY6lUjEUgbX49Asqqz8eJu/view?usp=sharing
5	Budidaya Tanaman Pangan Dan Hortikutura Melon (2022)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Tenant Kelompok Petani Kube Sriwijaya Bakung III	https://drive.google.com/file/d/1ethC03XtmKaLA9pabXGT7P4LKFhpyTt/view?usp=sharing
6	Tenant Kelompok Usaha Bersama Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Tomat (2024)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Kelompok Usaha Bersama Bakung 1	https://drive.google.com/file/d/1aSt-UDuJA97tQtIjSzmqLaOGrwM9B-QN/view?usp=sharing
7	Tenant Kelompok Usaha Bersama Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Bangkuang (2024)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Kelompok Usaha Bersama Bakung 2	https://drive.google.com/file/d/1lFnz3_zwVrEY6cbYjOTEdkJ0kRXIjAl/view?usp=sharing
8	Tenant Kelompok Usaha Bersama Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Singkong (2024)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Kelompok Usaha Bersama Bakung 3	https://drive.google.com/file/d/1d3HB-AKcV-ao7l5oMVTekh6ky_wrRN86/view?usp=sharing
9	Tenant Kelompok Usaha Bersama Budidaya Tanaman Pangan dan Holtikultura Cabai (2024)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Kelompok Usaha Bersama Bakung 4	https://drive.google.com/file/d/1Ld_r5hpVlreGlyix3XNg-XKCEbl0y4gF/view?usp=sharing
10	Pengalengan Produk Makanan (2024)	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	Bappeda Litbang Kota Palembang	https://docs.google.com/document/d/1-flZrxLa0cWLozuT1vi1y9ZKWLaj4p2V/edit?usp=sharing&oid=105341889493272319314&rtpof=true&sd=true

No	Kerjasama yang Dihasilkan dari Fasilitas dan Koordinasi			
	Kerjasama Pemanfaatan Riset dan Inovasi Daerah	Mitra Kerjasama Penghasil Inovasi	Mitra Kerjasama Pengguna Inovasi	Bukti Dukung (Link-PKS/Berkas Kerjasama Lainnya)
11	Riset Tumbuhan sebagai Pewarna Alami Tekstil	Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan	BRIN	https://drive.google.com/file/d/1IXNZxJfI7P1H0nL-KjTCptYpVpVBPYb4/view?usp=sharing

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan berhasil menjadi salah satu provinsi dengan predikat Provinsi Sangat Inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) pada tahun 2020 - 2024. Tetapi pelaksanaan Inovasi Daerah belum optimal karena :

1. Belum optimalnya kolaborasi sinergi riset dan inovasi daerah.
2. Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi.
3. Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi.
4. Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain.
5. Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara optimal.
6. Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga dapat berdampak negatif terhadap inovasi.

2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Kemiskinan dan Stunting yang masih tinggi

Tingkat kemiskinan menjadi isu di setiap daerah, dan penanganannya bersifat multidimensi. Sumatera Selatan yang masih memiliki tingkat kemiskinan di atas kemiskinan nasional yaitu sebesar 11,9%, dan tertinggi kedua setelah Provinsi Bengkulu di wilayah Sumatera Bagian Selatan.

2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal

Produktivitas Sektor Pertanian yang belum optimal di Sumatera Selatan akan mengancam ketahanan pangan. Hal ini tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan tetapi juga keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan cukup melimpah namun keterjangkauan dan pemanfaatan pangan masih rendah.

3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal

Perkembangan aspek demografi menunjukkan adanya fenomena degrowth atau pertumbuhan penduduk yang menurun. Kondisi ini berimplikasi kepada penyediaan kebutuhan sarana dan sarana di masa yang akan datang. Bonus demografi yang akan dialami 10 tahun ke depan perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM. Salah satu indikator kondisi Pendidikan yang sedang berjalan adalah indikator akses dan pemerataan Pendidikan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar cakupan pelayanan Pendidikan sekaligus untuk mengetahui berapa banyak anak yang belum terlayani pendidikannya di setiap jenjang Pendidikan.

4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal

Pembangunan infrastruktur regional dan atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata. Terdapat wilayah yang memiliki indeks aksesibilitas yang rendah dan terdapat daerah yang masih sulit dijangkau moda transportasi.

5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal

Perubahan iklim yang terjadi akan menurunkan kualitas lingkungan dan pada akhirnya berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat. Penurunan kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari: a) terjadinya peningkatan luas lahan kritis dalam periode waktu 2015-2019 (penambahan luas lahan sangat kritis pada tahun 2019 hampir delapan kali luas lahan sangat kritis pada tahun 2015. b), telah terjadi peningkatan laju deforestasi dari $\pm 2.853,5$ Ha/tahun menjadi ± 17.438 Ha/tahun. c) pemanfaatan area gambut rentan terhadap kebakaran hutan dan pemicu perubahan iklim) terjadinya polusi udara yang berdampak pada penurunan kualitas udara.

6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal

Peningkatan daya saing ekonomi dan realisasi investasi di Provinsi Sumatera Selatan membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.

7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah

Isu kemandirian daerah mengemuka setelah dua dekade otonomi daerah. Sebagian besar daerah masih menggantungkan pendapatan dari Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dengan kontribusi rata-rata hampir 90% terhadap total pendapatan daerah, dan selebihnya bersumber dari kontribusi PAD.

8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan

Provinsi Sumatera Selatan mengandalkan sumberdaya alam sebagai penopang ekonomi dengan sektor unggulan sektor pertanian dan pertambangan batubara.

9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Transformasi tata kelola pemerintahan terlihat dari indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan indeks pelayanan publik. Peningkatan indeks-indeks ini akan berkontribusi pada stabilitas sosial melalui pelayanan yang lebih baik. Tata kelola birokrasi di Provinsi Sumatera Selatan masih perlu ditingkatkan, karena Indeks Keterbukaan Informasi dan Integritas masih di bawah rata-rata nasional. Peningkatan integritas dan keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan menjaga stabilitas sosial. Sebagian besar kabupaten/kota di Sumatera Selatan masih memiliki Indeks SPBE kategori C atau CC, dengan hanya Kabupaten Muara Enim yang mencapai kategori B. Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan mendukung stabilitas sosial, diperlukan regulasi yang jelas, kelembagaan yang efektif, serta meritokrasi dan integritas, di mana kelembagaan yang efektif akan mendorong pelayanan publik yang berkualitas.

Tabel. 2 3 (Inmen 2/2025) Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Penelitian dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah Sumatera Selatan	(1) belum optimalnya kolaborasi sinergi riset dan inovasi daerah	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Sikronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
				2. Hilirisasi industri	2. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	3. Rendahnya kapasitas fiskal		3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4. Peningkatan kualitas SDM		
				5. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				6. Tata kelola pemerintahan		



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				dan stabilitas sosial		
				7. Peningkatan komunikasi publik		
	(2) Kurang tersedianya dana yang memadai dalam mendorong inovasi dan riset, serta insentif bagi pelaku inovasi.	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal	1. Ketidakpastian ekonomi global	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Perubahan rantai pasok global (geopolitik Global)	2. Hilirisasi industri	2. Ketergantungan Komoditas Primer dan Rendahnya Nilai Tambah	2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
			3. Transisi energi dan ekonomi hijau	3. Rendahnya kapasitas fiskal		3. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
				4. Peningkatan kualitas SDM		4. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				5. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasa		



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	(3) Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi .	Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal		6. Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosia		
				7. Peningkatan komunikasi publik		
			1. Ketidakpastian ekonomi global	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			2. Perubahan rantai pasok global (geopolitik Global)	2. Hilirisasi industri	2. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
			3. Transisi energi dan ekonomi hijau	3. Rendahnya kapasitas fiskal	3. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4. Transformasi ekonomi.		
				5. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		
				6. Peningkatan kualitas SDM		



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				7. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasa		
				8. Penyerapan tenaga kerja:		
	(4) Persaingan global dan antar wilayah yang semakin ketat menuntut daerah untuk terus berinovasi agar dapat bersaing dengan daerah lain.	1. Kerentanan Ketahanan Pangan (Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Perkebunan) 2. Ancaman Keanekaragaman Hayati	1. Sikronisasi Kebijakan	1. Peningkatan daya saing dan realisasi investasi	1. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
			Makro dan Sektoral	2. Hilirisasi industry	2. Kerentanan dan Potensi Bencana	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
		3. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 4. Polusi dan Kerusakan Lingkungan	2. Penerapan Standar Sustainability yang	3. Rendahnya kapasitas fiskal	3. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
			Tinggi di Level Global	4. Transformasi ekonomi.		4. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi.
				5. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		5. Layanan Pendidikan dan



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						Kesehatan Belum Optimal
				6. Pengentasan kemiskinan dan stunting		
				7. Peningkatan kualitas SDM		
				8. Pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar		
				9. Penyerapan tenaga kerja		
				10. Wajib belajar 13 tahun		
				11. Makan bergizi gratis		
				12. Penyerapan tenaga kerja:		
	(5) Perubahan teknologi yang semakin cepat menuntut daerah		1. Sikronisasi Kebijakan	1. Pengelolaan sampah nasional	1. Ancaman Degradasi Lingkungan	1. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
	untuk terus mengikuti perkembangan teknologi agar dapat memanfaatkannya secara optimal.		Makro dan Sektoral	2.Pengurangan susut dan sisa pangan.	2. Disparitas Kualitas Sumber Daya Manusia	2. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
			2. Penerapan Standar Sustainability yang Tinggi di Level Global	3.Keanekaragaman hayati dan kerusakan lingkungan	3. Kesenjangan Infrastruktur Antarwilayah	3. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial
				4.Tata kelola pemerintahan dan stabilitas sosial	4. Diversifikasi dan Hilirisasi Industri belum Optimal	4. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
				5.Peningkatan komunikasi publik		
				6.Kesenjangan infrastruktur		
				7.Peningkatan daya saing dan realisasi investasi		
				8.Hilirisasi industri		
				9.Rendahnya kapasitas fiskal		
				10. Transformasi ekonomi.		



Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
				11. Peningkatan nilai tambah sektor unggulan		

*) dapat merujuk pada isu dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 didasarkan pada visi misi RPJPD, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD 2025-2045, dan isu strategis aktual. Merujuk pada Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 yaitu ***“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan”*** dan Sasaran Pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 yaitu ***“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”***, maka tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu ***“Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah”***.

3.2 Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ekosistem Inovasi
2. Meningkatnya Kapabilitas Inovasi
3. Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA)

Sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sebagaimana tertuang pada Tabel 3.1 berikut:



Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran BRIDA Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-							KET
				Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Urusan : Penelitian dan Pengembangan Sasaran Misi 6 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah										
		Meningkatnya Ekosistem Inovasi	Indek Ekosistem Inovasi (Indeks Inovasi Daerah)	75,79	76,55	77,31	78,09	78,87	79,66	80,45	
		Meningkatnya Kapabilitas Inovasi	Indeks Kapabilitas Inovasi	0	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	
		Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	0	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.3 Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi Perangkat Daerah adalah Rencana Tindakan yang Komperensif dan berisi langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya berupa optimalisasi Sumber Daya, Tahapan, Fokus, Lokus, dan Penentuan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan / sasaran renstra perangkat daerah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Strategi yang dilakukan :

1. Menyelaraskan dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan RKA) dengan regulasi nasional maupun daerah.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) secara periodik terhadap capaian program/kegiatan.
3. Menyusun laporan kinerja (LKjIP, Laporan Triwulan, Tahunan) secara tepat waktu, akurat, dan sesuai standar akuntabilitas.
4. Memanfaatkan aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), SIPD, dan aplikasi pelaporan lain yang ditetapkan.
5. Membangun koordinasi lintas bidang/UPTD dalam penyusunan rencana, monev, dan pelaporan.
6. Memberikan pelatihan teknis/diklat perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, kepegawaian dan tata usaha keuangan/akutansi pemerintahan serta pengembangan karir.
7. Menata inventarisasi dan pengendalian aset secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
8. Membangun budaya kerja organisasi berbasis integritas, pelayanan, dan profesionalisme.
9. Memberikan layanan kepegawaian, administrasi, dan dukungan umum yang cepat, tepat, dan responsif.
10. Menyusun rencana kebutuhan anggaran sesuai dengan prioritas program dan kegiatan.
11. Melaksanakan penatausahaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Mengembangkan sistem administrasi keuangan berbasis digital untuk efisiensi dan akurasi.
13. Menyusun laporan keuangan secara periodik, akurat, dan tepat waktu.
14. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala.
15. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Tata Ruang dan Peraturan Pemanfaatan Kawasan.

16. Melaksanakan dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sumatera selatan tentang Riset dan Inovasi
17. Melaksanakan dan meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan, pengakajian, perekayasan serta penerapan hasil riset dan inovasi berdasarkan tranformasi ekonomi biru dan pembangunan berkelanjutan
18. Mewujudkan ekosistem riset dan inovasi melalui peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Daerah
19. Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunnn daerah dalam mengembangkan potensi unggulan
20. Meningkatnya Pusat Inovasi, inkubator dan techno park
21. Meningkatnya kerjasama antar sektor pemerintah, akedemisi, dunia usaha, masyarakat dan media
22. Tersusunnya laporan hasil Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan riset dan inovasi
23. Meningkatnya Paten/HKI dari penelitian/pengembangan/riset /invensi/inovasi yang dihasilkan
24. Meningkatnya starup / UKM berbasis Inovasi
25. Meningkatnya penelitian / pengembangan / riset / invensi/ Inovasi yang dihasilkan
26. Jumlah Produk LitbangJirab yang lulus Inkubasi (TBL > 9)
27. Meningkatnya SDM Iptek yang bersertifikat atau memiliki pengetahuan
28. Meningkatnya Publikasi Ilmiah / Paten
29. Meningkatnya lembaga Riset yang memiliki akreditasi / pengakuan internasional
30. Meningkatnya Peraturan/Regulasi tentang penelitian/ pengembangan / riset / invensi/ Inovasi
31. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah
32. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah
33. Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah
34. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian
35. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Umum
36. Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah
37. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
38. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

39. Menguatkan Ekosistem Riset dan Inovasi
40. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
41. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi untuk Pembangunan Daerah
42. Melakukan Kolaborasi Lintas Sektor

3.4 Penahapan Pembangunan

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Pembangunan Badan dan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam periode 2026–2030 dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari fondasi dasar hingga konsolidasi kemandirian. Pada tahap awal (2026), fokus diarahkan pada peningkatan ekosistem Inovasi melalui peningkatan tatakeloladan pelayanan publik melalui kolaborasi dan sinergitas program dan kegiatan penelitian, pengembangan, pengakajian, perekayasaan dan penerapan hasil riset dan inovasi bersama mitra dan semua pihak berkepentingan melalui metode pentahelix dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada di Badan riset dan inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menghasilkan kajian atau rekomendasi yang menjadi solusi dari permasalahan serta isu strategis Pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Memasuki tahap implementasi (2027–2029), program difokuskan pada Optimalisasi Sinergitas Kolaborasi dengan mitra eksternal melalui pendekatan pentahelix, Penerapan & Uji Coba Inovasi dan Peningkatan Skala & Replikasi, serta pada Tahap akhir (2030) diarahkan Konsolidasi & Kemandirian Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Penahapan Pembangunan sektor riset dan inovasi daerah di dalam Renstra Baadan Riseet Inovasi Daerah Provinsi sumatera selatan disajikan pada tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
I: Penguatan Tata Kelola Sinergitas & Kolaborasi	II: Optimalisasi Sinergitas Kolaborasi	III: Penerapan & Uji Coba Inovasi	IV: Peningkatan Skala & Replikasi	V: Konsolidasi & Kemandirian
Fokus Utama: 1. Penguatan fondasi tata kelola kelembagaan dan sumber daya internal BRIDA 2. Penguatan kolaborasi dengan mitra eksternal melalui pendekatan pentahelix.	Optimalisasi kolaborasi dengan mitra eksternal melalui pendekatan pentahelix.	Penerapan hasil riset dan inovasi untuk solusi masalah daerah & peningkatan pelayanan.	Mengembangkan inovasi yang berhasil ke skala yang lebih luas dan mereplikasi.	Membangun kemandirian BRIDA dalam menghasilkan Riset dan Inovasi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi (hilirisasi dan komersiliasi secara massive sebagai solusi permasalahan di masyarakat
Kegiatan kunci: 1. Sosialisasi Rencana induk kelitbangan dan Peta Jalan pemajuan IPTEK. 2. Sosialisasi dan penerapan Perda Riset dan Inovasi 3. Perluasan Kerjasama kemitraan (pentahelix). 4. Pengembangan platform kolaborasi. 5. Optimalisasi sumber daya.	1.Peningkatan Perluasan kemitraan (pentahelix). 2.Peningkatan Pengembangan platform kolaborasi. 3.Optimalisasi sumber daya.	1. Pelaksanaan uji coba inovasi. 2. Fasilitasi aplikasi hasil Litbang. 3. Evaluasi dampak penerapan. 4. Dokumentasi dan diseminasi hasil.	1. Skalabilitas cakupan penerapan inovasi. 2. Replikasi inovasi unggulan ke daerah lain. 3. Penyusunan regulasi pendukung. 4. Pemberian insentif inovasi.	1. Keberlanjutan ekosistem inovasi. 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan. 3. Pengembangan SDM berkelanjutan. 4. Pengukuran dampak jangka panjang.

3.5 Penyajian Lokus

Program dan kegiatan dapat dipetakan menurut sebaran kewilayahan administrasi, sehingga lebih mudah diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan daerah masing masing yaitu di 17 Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Selain dikelompokkan berbasis kabupaten/kota, lokus juga dapat sesuai wilayah pengembangan (landscape/ecosystem based management) yang lebih menekankan kesatuan ekosistem dan klaster Produk Unggulan Dearah (PUD) Provinsi Sumatera Selatan.

3.6 Arah Kebijakan Badan Riset Dan Inovasi Provinsi Sumatera Selatan Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Badan riset dan Inovasi Daerah Provinsi Tahun 2025 2029 sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penu njang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi, ditetapkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah dan tatakelola pemerintahan dan pelayanan public yang baik secara berkelanjutan. Kebijakan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, evaluasi capaian kinerja sebelumnya, serta memperhatikan prioritas nasional dan daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Secara umum, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan ekosistem Inovasi, kapabilitas Inovasi dan berbasis bukti .Arah Kebijakan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.3. di bawah ini.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Badan Riset Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan Ekosistem Inovasi	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
2	Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;			
3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:			
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah			
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
7	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;			



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8	Peraturan Daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan			
9	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;			
10	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;			
1	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek		Meningkatkan Kapabilitas Inovasi	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
2	Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;			
3	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;			
4	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah			



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah			
6	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
7	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;			
8	Peraturan Daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan			
9	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;			
10	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;			



NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;		Kebijakan Berdasarkan Bukti	Mendukung Misi 6 Gubernur Sumsel 2025-2029
2	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;			

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BRIDA merupakan Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di Provinsi.

Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan merupakan salah satu penunjang pemerintah berdasarkan instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana strategi perangkat daerah tahun 2025-2029. Dalam rangka mencapai tujuan renstra perangkat daerah akan diuraikan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

4.1 Uraian Program

Kebijakan Perangkat Daerah disusun sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pengembangan dan penelitian melalui upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam bentuk program yang terukur. Program adalah sekumpulan kegiatan yang saling terkait dan terorganisasi yang dirancang untuk mencapai tujuan perangkat daerah. Setiap program terdiri dari beberapa kegiatan yang saling mendukung, program memiliki indikator keberhasilan. Program disusun berdasarkan prioritas pembanguna daerah dan arahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Program Brida yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan. Program ini menjadi fondasi yang menopang keberhasilan penyelenggaraan riset, pengembangan inovasi, serta penyusunan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah.

Melalui program penunjang ini, BRIDA Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk memastikan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Kegiatan yang dilaksanakan mencakup aspek pengelolaan perencanaan, keuangan, kepegawaian, serta sarana dan prasarana penunjang operasional. Dengan dukungan

yang memadai, diharapkan pelaksanaan riset dan inovasi dapat berjalan lebih terstruktur dan berkesinambungan.

Selain itu, program ini juga menjadi sarana penguatan kapasitas sumber daya aparatur melalui peningkatan kompetensi, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kinerja organisasi. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk mendorong terciptanya birokrasi modern yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Dalam konteks Provinsi Sumatera Selatan, keberadaan program penunjang urusan pemerintahan daerah di BRIDA memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang berdaya saing, berinovasi, serta berbasis riset.

Dengan adanya dukungan program ini, BRIDA diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan, inovasi pelayanan publik, serta solusi berbasis riset untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, penguatan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang akuntabel. Upaya yang dilakukan meliputi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah, Administrasi Keuangan Perangkat daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penelitian dan Pengembangan

Program Penelitian dan Pengembangan merupakan program strategis yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mendukung penguatan kebijakan pembangunan berbasis riset serta mendorong terciptanya inovasi daerah. Program ini difokuskan untuk menghasilkan kajian, penelitian, dan pengembangan yang aplikatif, sehingga mampu memberikan rekomendasi dan solusi terhadap permasalahan pembangunan daerah, baik di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan.

Melalui program ini, BRIDA Provinsi Sumatera Selatan berperan sebagai pusat pengetahuan (knowledge center) yang menjembatani antara dunia akademik, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Penelitian

yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan nyata pembangunan daerah, seperti peningkatan daya saing ekonomi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengembangan teknologi tepat guna.

Kegiatan penelitian dan pengembangan juga mencakup penyusunan naskah akademik, kajian strategis, model inovasi daerah, serta pengembangan produk riset yang dapat diimplementasikan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, BRIDA Provinsi Sumatera Selatan mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, komunitas inovator, dan sektor swasta untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di daerah.

Dengan adanya program penelitian dan pengembangan ini, diharapkan BRIDA mampu menghasilkan output berupa rekomendasi kebijakan berbasis eviden, prototipe inovasi, maupun model solusi yang dapat diadopsi oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.

Pada akhirnya, program ini diharapkan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Sumatera Selatan yang inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

3. Program Riset dan Inovasi

Program Riset dan Inovasi merupakan salah satu program utama yang dijalankan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperkuat kapasitas daerah menuju pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan hasil riset dengan kebutuhan nyata masyarakat dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Melalui program ini, BRIDA Provinsi Sumatera Selatan berupaya mendorong lahirnya inovasi daerah yang dapat menjadi solusi terhadap berbagai tantangan pembangunan, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan daya saing ekonomi, serta pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kesejahteraan masyarakat. Riset dan inovasi tidak hanya diarahkan pada aspek akademik, tetapi juga pada pengembangan produk, model kebijakan, dan sistem layanan yang dapat langsung diimplementasikan di tingkat daerah.

Pelaksanaan program riset dan inovasi ini melibatkan kolaborasi

lintas sektor, termasuk perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, komunitas inovator, serta masyarakat. Sinergi tersebut bertujuan untuk membangun ekosistem riset dan inovasi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan karya inovatif yang bermanfaat secara praktis sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Melalui penguatan program ini, BRIDA diharapkan dapat berperan sebagai katalis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif, memperkuat daya saing daerah, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sumatera Selatan. Program Riset dan Inovasi pada akhirnya diharapkan mampu menjadikan Provinsi Sumatera Selatan sebagai salah satu pusat unggulan riset dan inovasi di tingkat nasional, dengan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan adalah bagian dari Program yang lebih spesifik dan terukur, memiliki output yang jelas dan dapat diamati untuk tercapainya tujuan dan sasaran program.

Kegiatan BRIDA untuk 5 tahun kedepan terdiri dari 8 Kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, 4 Kegiatan pada Program Penelitian dan Pengembangan, dan 2 Kegiatan pada Program Riset dan Inovasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 8 (delapan) kegiatan :

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah,
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah,
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah,
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah,
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah,
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dan
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari 4 (empat) kegiatan :

- 1) Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan,

- 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan,
- 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan
- 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

3. Program Riset dan Inovasi, terdiri dari 2 (dua) kegiatan :

- 1) Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, dan
- 2) Kegiatan Inovasi dan Inovasi.

4.3 Uraian Sub Kegiatan

Subkegiatan adalah unit terkecil yang menggambarkan aktivitas teknis maupun administratif. Melalui subkegiatan inilah target program dan kegiatan diterjemahkan dalam bentuk output nyata yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Rincian Subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan, selama 5 tahun ke depan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja P),
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dengan indikator output Jumlah Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-PERANGKAT DAERAH,
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dengan indikator output Jumlah Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-PERANGKAT DAERAH,
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-PERANGKAT DAERAH dengan indikator output Jumlah Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-PERANGKAT DAERAH,
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH dengan indikator output Jumlah Dokumen Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-PERANGKAT DAERAH,
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar

- Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah,
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 8. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN,
 9. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN,
 10. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah,
 11. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah,
 12. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dengan indikator output Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan,
 13. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran Perangkat Daerah,
 14. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah,
 15. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah Perangkat Daerah,
 16. Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada

Perangkat Daerah,

17. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya dengan indikator output Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan,
18. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan indikator output Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan,
19. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan indikator output Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan,
20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator output Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor,
21. Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator output Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan,
22. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator output Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan,
23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan indikator output Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan,
24. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah,
25. Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah dengan indikator output Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada Perangkat Daerah,
26. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator output Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan,
27. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator output Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan,
28. Pengadaan Mebel dengan indikator output Jumlah Paket Mebel yang Disediakan,
29. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator output Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan,
30. Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya dengan indikator output Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan,

31. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat,
32. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,
33. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator output Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan,
34. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator output Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya,
35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator output Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya,
36. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator output Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara,
37. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan indikator output Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi,
38. Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator output Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi,
39. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator output Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi,
40. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah,
41. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan,

42. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi dengan indikator output Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi,
43. Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi dengan indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi,
44. Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan dengan indikator output Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola,
45. Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan dengan indikator output Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan,
46. Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Budaya,
47. Penelitian dan Pengembangan Pariwisata dengan indikator output Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata,
48. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan,
49. Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat,
50. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
51. Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan dengan indikator output jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan,
52. Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan,
53. Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan,

54. Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dengan indikator output Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral,
55. Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup,
56. Penelitian dan Pengembangan Kehutanan dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan,
57. Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman,
58. Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi dengan indikator output Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi,
59. Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi dengan indikator output Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi,
60. Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif dengan indikator output Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif,
61. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan dengan indikator output Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan,
62. Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan indikator output Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual,
63. Fasilitasi dan pembinaan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dengan indikator output Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
64. Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dengan indikator output Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah,

65. Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset dengan indikator output Jumlah Naskah Kebijakan Berbasis Hasil Riset,
66. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dengan indikator output Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
67. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan dengan indikator output Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan,
68. Fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi dengan indikator output Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi,
69. Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan dengan indikator output Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan,
70. Penyusunan Kebijakan di Bidang Inovasi dan Inovasi dengan indikator output Jumlah Naskah Kebijakan di Bidang Inovasi dan Inovasi,
71. Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan dengan indikator output Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah,
72. Pemantauan dan evaluasi Inovasi dan Inovasi dengan indikator output Laporan pemantauan dan evaluasi Inovasi dan Inovasi,
73. Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah dengan indikator output Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah,
74. Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan Kebun Raya Daerah dengan indikator output Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah,
75. Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan

inovasi di daerah dengan indikator output Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah,

76. Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dengan indikator ouput Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatn kekayaan intelektual.

Program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dirumuskan secara sistematis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dokumen RPJMD serta Rencana Strategis Nasional yang relevan. Perumusan dimulai dari penetapan sasaran strategis perangkat daerah, yang kemudian dijabarkan menjadi program, sebagai wadah kebijakan pembangunan yang bersifat lintas kegiatan. Selanjutnya, setiap program dirinci menjadi kegiatan yang lebih operasional, berorientasi pada pencapaian output tertentu sesuai tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian dijabarkan lagi ke dalam subkegiatan, yang memuat unit aktivitas terkecil, jelas indikator dan target kinerjanya, serta dapat diukur capaian dan kebutuhan anggarannya.

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada tabel 4.1 dan Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan disajikan pada tabel 4.2 dibawah ini.



Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan

No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis	Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
1	Urusan :								
2	Penelitian dan Pengembangan								
3	Sasaran Misi 6 :								
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah							
5	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sinas Iptek)		1	Meningkatnya Ekosistem Inovasi			Indek Inovasi Daerah		Indek Daya Saing Daerah (IDSD) dari Kemendagri / Bappenas
6	Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 mengatur tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;								
7	Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:				1:01	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Perencanaan Pembangunan	Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
8	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Litbang di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah					Meningkatnya Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
9	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah						Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Budaya	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
10	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik						Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
11	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;						Meningkatnya Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian Bid Partisipasi Masyarakat	Jumlah Rekomendasi Hasil Penelitian Bid Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat	
12	Peraturan Daerah provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan				1.2.1	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Jumlah Potensi unggulan daerah yang dikembangkan dari inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
13	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045;						Meningkatnya Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
14	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;						Meningkatnya Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
15							Meningkatnya Jumlah hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil Penelitan dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
16							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
17							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
18							Meningkatnya Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
19							Meningkatnya Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	Kegitan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
20							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
21							Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
22					1.2.2.	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
23							Meningkatnya Jumlah hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil Penelitian dan Pengembanga Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
24							Meningkatnya jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	
25					1.3	Meningkatnya kajian termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
						dalam penyelesaian permasalahan daerah				
26							Meningkatnya Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
27							Meningkatnya Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
28							Meningkatnya Jumlah hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
29							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
30							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
31							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
32							Meningkatnya Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
33					1.4	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah.		Persentase Fasilitas Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan Perkajian dan Penerapan di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
34							Meningkatnya Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
35							Meningkatnya Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
36							Meningkatnya Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	11. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Lokal
37							Meningkatnya Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
38							Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	
39							Meningkatnya Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
40					1.5	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	
41							Meningkatnya Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
42							Meningkatnya Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	
43							Meningkatnya Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
44							Meningkatnya Jumlah laporan pelaksanaan invasi dan inovasi	Jumlah laporan Hasil pelaksanaan invasi dan inovasi	Kegiatan Invensi dan Inovasi	
45							Meningkatnya Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	
46							Meningkatnya Laporan pemantauan dan evaluasi Invensi dan Inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi Invensi dan Inovasi	Pemantauan dan evaluasi Invensi dan Inovasi	
47					1.6	Meningkatnya Fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah		Persentase Fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	
48							Meningkatnya Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah Laporan Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
49							Meningkatnya Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
50							Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inovensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inovensi dan Inovasi	Kegiatan Inovensi dan Inovasi	
51							Meningkatnya Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	
52							Meningkatnya Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	
53							Meningkatnya Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah	
54							Meningkatnya Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	
55							Meningkatnya Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatn kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatn kekayaan intelektual	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
56			2	Meningkatnya Kapabilitas Inovasi				Indek Kapabilitas Inovasi		



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
57					2:01	Meningkatnya Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah.		Persentase Fasilitas Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan Perkajian dan Penerapan di Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
58							Meningkatnya Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
59							Meningkatnya Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
60							Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Dan Reformasi Birokrasi	
61							Meningkatnya Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
62							Meningkatnya Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
							Hasil-Hasil Kelitbangan			
63						Meningkatnya Fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi didaerah		Persentase Fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi didaerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	
64							Meningkatnya Jumlah Laporan Kegiatan pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah Laporan Kegiatan pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
65							Meningkatnya Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	
66							Meningkatnya Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan Kebun Raya Daerah	
67			3	Meningkatnya Kebijakan Berbasis Bukti				Persentase Kebijakan Berbasis Bukti		
68					3.1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan		Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
69							Meningaktnya Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan dan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
70							Meningkatnya Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Pelaksanaan Peraturan	
71										
72					3.2	Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah		Persentase kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Program Riset dan Inovasi Daerah	
73							Meningkatnya Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	
74							Meningkatnya Jumlah Naskah Kebijakan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	
75					3.2.	Meningkatnya pemanfaat inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Program Riset dan Inovasi Daerah	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
76							Meningkatnya Jumlah Laporan Kegiatan Invensi dan Inovasi	Jumlah Laporan Kegiatan Invensi dan Inovasi	Kegiatan Invensi dan Inovasi	
77							Meningkatnya Jumlah Naskah Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi	Jumlah Naskah Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi	Penyusunan Kebijakan di Bidang Invensi dan Inovasi	
78										
79			4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah				Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		
80					4.1.	Tersusunnya Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah		(1) Persentase Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan yang tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
81							Tercapainya Kinerja yang meningkat/ berkembang	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang meningkat / berkembang	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
82							Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja P)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
83							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
84							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
85							Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
86							Terlaksannya Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	
87							Terlaksanannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
88							Terlaksannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
89					4.2	Tersusunnya Tata Kelola Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Keuangan yang Tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
90							Tersusunnya Dokumen Keuangan	Persentase Dokumen Keuangan yang Tersusun	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
91							Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
92							Tersusunnya dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
93							Tersusunnya Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
94							Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
95							Tersusunnya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
96							Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
97					4.3	Terdokumentasinya Tata Kelola Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah yang terdokumentasi	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
98							Terdokumentasinya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah yang terdokumentasi	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
99							Tersusunnya Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
100							Tersusunnya Laporan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
101							Tersusunnya Laporan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
102					4.4	Terlaksananya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
103							Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terlaksana	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
104							Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
105							Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
106					4.5	Tersedianya Tata Kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
107							Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
108							Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
109							Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
110							Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
111							Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
112							Pensediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
113							Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
114							Tersusunnya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
115					4.6	Terlaksananya Tata Kelola Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
116							Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
117							Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
118							Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
119							Terlaksananya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
120							Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
121							Terksanannya Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
122					4.7	Tersediannya Tata Kelola Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
123							Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang yang Terpenuhi	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
124							Terlaksananya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
125							Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
126							Terlaksananya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
127					4.8	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
128							Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
129							Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
130							Terlaksananya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	



No	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN		OUTCOME		OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
	(Urusan dan Sasaran Misi 6)	OPD	Strategis		Sasaran		dari Outcome	Tujuan/sasaran/outcome/output		
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)
131							Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
132							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	
133							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
134							Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Anggaran Total		16,611,582,240		21,107,265,016		25,469,652,314		33,292,651,918		34,292,651,918		35,292,651,918		40,033,739,053		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Peresentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	15,424,697,876	100%	19,559,895,016	100%	22,782,052,314	100%	26,892,651,918	100%	28,417,651,918	100%	28,892,651,918	100%	31,683,739,053		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	23,000,000	%	108,700,000	%	110,000,000	%	260,000,000	%	273,000,000	%	212,000,000	%	210,000,000		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra, Renja, Renja P)	5,000,000	Dokumen	99,200,000	Dokumen	25,000,000	Dokumen	77,500,000	Dokumen	80,000,000	Dokumen	50,000,000	Dokumen	50,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	10,000,000	Dokumen	11,000,000	Dokumen	12,000,000	Dokumen	13,000,000	Dokumen	15,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	10,000,000	Dokumen	11,000,000	Dokumen	12,000,000	Dokumen	13,000,000	Dokumen	15,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	10,000,000	Dokumen	11,000,000	Dokumen	12,000,000	Dokumen	13,000,000	Dokumen	15,000,000		
Koordinasi dan Pengusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	-	Dokumen	-	Dokumen	10,000,000	Dokumen	11,000,000	Dokumen	12,000,000	Dokumen	13,000,000	Dokumen	15,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5,000,000	Laporan	3,500,000	Laporan	35,000,000	Laporan	88,500,000	Laporan	90,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	50,000,000		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13,000,000	Laporan	6,000,000	Laporan	10,000,000	Laporan	50,000,000	Laporan	55,000,000	Laporan	60,000,000	Laporan	50,000,000		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya administrasi keuangan yang tersedia	10,866,790,834	%	12,975,878,000	%	18,307,854,000	%	20,237,573,773	%	21,653,160,958	%	22,520,515,998	%	23,983,739,053		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10,765,333,770	Orang / Bulan	12,791,378,000	Orang / Bulan	17,985,354,000	Orang / Bulan	19,862,823,773	Orang / Bulan	21,250,160,958	Orang / Bulan	22,086,515,998	Orang / Bulan	23,493,739,053		
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Dokumen	127,500,000	Dokumen	125,000,000	Dokumen	137,500,000	Dokumen	150,000,000	Dokumen	160,000,000	Dokumen	175,000,000		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101,457,064	Dokumen	50,000,000	Dokumen	137,500,000	Dokumen	151,250,000	Dokumen	160,000,000	Dokumen	170,000,000	Dokumen	190,000,000		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Laporan	3,500,000	Laporan	15,000,000	Laporan	16,500,000	Laporan	18,000,000	Laporan	19,000,000	Laporan	25,000,000		
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	Dokumen	3,500,000	Dokumen	20,000,000	Dokumen	42,000,000	Dokumen	45,000,000	Dokumen	50,000,000	Dokumen	50,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Laporan	-	Laporan	25,000,000	Laporan	27,500,000	Laporan	30,000,000	Laporan	35,000,000	Laporan	50,000,000		
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah yang terdokumentasi	-	%	15,500,000	%	15,000,000	%	81,500,000	%	89,650,000	%	35,661,780	%	100,000,000		
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	dokumen	3,500,000	dokumen	5,000,000	dokumen	25,500,000	dokumen	28,050,000	dokumen	6,226,660	dokumen	30,000,000		
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	laporan	5,000,000	laporan	-	laporan	15,000,000	laporan	16,500,000	laporan	16,981,800	laporan	20,000,000		
Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Laporan	7,000,000	Laporan	10,000,000	Laporan	41,000,000	Laporan	45,100,000	Laporan	12,453,320	Laporan	50,000,000		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Administrasi Kepegawaian	10,000,000	%	41,500,000	%	224,300,000	%	246,730,000	%	255,000,000	%	279,327,968	%	335,000,000		
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Paket	22,500,000	Paket	184,300,000	Paket	202,730,000	Paket	210,000,000	Paket	229,514,688	Paket	275,000,000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10,000,000	Orang	19,000,000	Orang	40,000,000	Orang	44,000,000	Orang	45,000,000	Orang	49,813,280	Orang	60,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tersedia	849,100,682	%	521,368,846	%	554,000,000	%	1,244,400,000	%	1,350,700,000	%	1,040,871,128	%	1,445,000,000		
Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Peneranga n Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	10,000,000	Paket	50,000,000	Paket	30,000,000	Paket	33,000,000	Paket	36,300,000	Paket	37,359,960	Paket	45,000,000		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	279,170,000	Paket	-	Paket	-	Paket	300,000,000	Paket	330,000,000	Paket	339,636,000	Paket	400,000,000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	95,000,000	Paket	118,296,752	Paket	120,000,000	Paket	207,000,000	Paket	220,000,000	Paket	149,439,840	Paket	175,000,000		
Penyediaan Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	67,000,000	Paket	85,000,000	Paket	35,000,000	Paket	88,500,000	Paket	97,350,000	Paket	43,586,620	Paket	50,000,000		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2,000,000	Dokumen	5,000,000	Dokumen	5,000,000	Dokumen	5,500,000	Dokumen	6,050,000	Dokumen	6,226,660	Dokumen	10,000,000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	395,930,682	Laporan	259,572,094	Laporan	364,000,000	Laporan	600,400,000	Laporan	650,000,000	Laporan	453,300,848	Laporan	750,000,000		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	Dokumen	3,500,000	Dokumen	-	Dokumen	10,000,000	Dokumen	11,000,000	Dokumen	11,321,200	Dokumen	15,000,000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	76,232,600	%	3,289,350,000	%	1,058,298,314	%	1,996,528,145	%	1,758,140,960	%	1,671,275,044	%	2,075,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		unit	-	unit	396,000,000	unit	500,000,000	unit	500,000,000	unit	500,000,000	unit	650,000,000		
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	36,650,000	unit	-	unit	120,000,000	unit	800,000,000	unit	500,000,000	unit	500,000,000	unit	550,000,000		
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Paket	25,000,000	Paket	118,298,314	Paket	130,128,145	Paket	143,140,960	Paket	147,320,676	Paket	175,000,000		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	unit	45,500,000	unit	224,000,000	unit	346,400,000	unit	375,000,000	unit	278,954,368	unit	400,000,000		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	39,582,600	unit	3,218,850,000	unit	200,000,000	unit	220,000,000	unit	240,000,000	unit	245,000,000	unit	300,000,000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Jasa Penunjang yang Terpenuhi	2,797,974,000	%	1,810,598,170	%	1,187,200,000	%	1,305,920,000	%	1,388,000,000	%	1,408,000,000	%	1,610,000,000		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	Laporan	6,500,000	Laporan	6,500,000	Laporan	7,150,000	Laporan	8,000,000	Laporan	8,000,000	Laporan	10,000,000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	540,000,000	laporan	479,000,000	laporan	535,000,000	laporan	588,500,000	laporan	630,000,000	laporan	650,000,000	laporan	750,000,000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2,254,974,000	laporan	1,325,098,170	laporan	645,700,000	laporan	710,270,000	laporan	750,000,000	laporan	750,000,000	laporan	850,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang meningkat Pemeliharaannya	801,599,760	%	797,000,000	%	1,325,400,000	%	1,520,000,000	%	1,650,000,000	%	1,725,000,000	%	1,925,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	312,400,000	Unit	308,000,000	Unit	309,000,000	Unit	315,000,000	Unit	340,000,000	Unit	357,000,000	Unit	375,000,000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45,000,000	Unit	83,500,000	Unit	76,000,000	Unit	80,000,000	Unit	85,000,000	Unit	93,000,000	Unit	100,000,000		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167,457,260	unit	135,500,000	unit	365,400,000	unit	375,000,000	unit	400,000,000	unit	415,000,000	unit	450,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	99,163,000	Unit	70,000,000	Unit	50,000,000	Unit	200,000,000	Unit	220,000,000	Unit	230,000,000	Unit	300,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	unit	-	unit	200,000,000	unit	200,000,000	unit	220,000,000	unit	230,000,000	unit	300,000,000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	177,579,500	unit	200,000,000	unit	325,000,000	unit	350,000,000	unit	385,000,000	unit	400,000,000	unit	400,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Lainnya																
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1. Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan, 2. Jumlah Potensi unggulan daerah yang dikembangkan dari inovasi, 3. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, 4. Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah, 5. Persentase Fasilitas Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan Perkajian dan Penerapan di Daerah.	1,186,884,364	%	1,547,370,000	%	2,167,600,000	%	5,300,000,000	%	4,625,000,000	%	5,050,000,000	%	6,450,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah hasil Litbang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	211,400,000	Dokumen	287,970,000	Dokumen	209,000,000	Dokumen	1,100,000,000	Dokumen	1,075,000,000	Dokumen	1,200,000,000	Dokumen	1,500,000,000		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	laporan	-	laporan	22,000,000	laporan	200,000,000	laporan	200,000,000	laporan	200,000,000	laporan	250,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	82,740,000	laporan	38,000,000	laporan	22,000,000	laporan	200,000,000	laporan	175,000,000	laporan	200,000,000	laporan	250,000,000		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengembangan Aparatur Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	9,600,000	laporan	84,700,000	laporan	55,000,000	laporan	200,000,000	laporan	175,000,000	laporan	200,000,000	laporan	250,000,000		
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Asset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	-	laporan	63,270,000	laporan	44,000,000	laporan	200,000,000	laporan	175,000,000	laporan	200,000,000	laporan	250,000,000		
Pengelolaan Data dan Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	70,000,000	dokumen	34,500,000	dokumen	22,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000		
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Peraturan yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	49,060,000	Rekomendasi	67,500,000	Rekomenasi	44,000,000	Rekomenasi	150,000,000	Rekomenasi	175,000,000	Rekomenasi	200,000,000	Rekomenasi	250,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah hasil Litbang Bidang Sosial dan Kependudukan	188,033,000	Dokumen	72,400,000	Dokumen	143,000,000	Dokumen	700,000,000	Dokumen	750,000,000	Dokumen	800,000,000	Dokumen	1,000,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Pendidikan dan Budaya	-	Dokumen	-	Dokumen	33,000,000	Dokumen	150,000,000	Dokumen	175,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	250,000,000	Pendidikan yang berkeadilan	
Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	-	dokumen	-	dokumen	33,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000	SumSel Wonderful 2030	
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	137,850,000	Dokumen	36,500,000	Dokumen	44,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	250,000,000	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Kesehatan untuk Semua (stunting), Perluasan Akses (Pendidikan Makan Bergizi Gratis)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	50,183,000	Dokumen	35,900,000	Dokumen	33,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	200,000,000	Dokumen	250,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah hasil litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	276,022,500	Dokumen	515,140,000	Dokumen	507,600,000	Dokumen	1,500,000,000	Dokumen	1,700,000,000	Dokumen	1,900,000,000	Dokumen	2,250,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	dokumen	35,900,000	dokumen	44,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000	100.000 Sultan Muda Sumsel	Pertumbuhan Ekonomi
Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan perindustrian dan perdagangan	-	dokumen	-	dokumen	44,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	100,000,000	dokumen	265,340,000	dokumen	176,400,000	dokumen	400,000,000	dokumen	450,000,000	dokumen	500,000,000	dokumen	500,000,000	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	
Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	76,022,500	dokumen	86,100,000	dokumen	65,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	-	dokumen	-	dokumen	33,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	-	dokumen	-	dokumen	22,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000		
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	100,000,000	dokumen	97,600,000	dokumen	79,200,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	-	dokumen	30,200,000	dokumen	44,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	175,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	250,000,000	Infrastruktur Tuntas Merata	
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah hasil pengembangan inovasi dan teknologi	511,428,864	Dokumen	671,860,000	Dokumen	1,308,000,000	Dokumen	2,000,000,000	Dokumen	1,100,000,000	Dokumen	1,150,000,000	Dokumen	1,700,000,000		
Penelitian , Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	58,009,678	dokumen	83,500,000	dokumen	250,000,000	dokumen	400,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	200,000,000	dokumen	300,000,000		
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	-	laporan	151,300,000	laporan	258,000,000	laporan	200,000,000	laporan	200,000,000	laporan	200,000,000	laporan	300,000,000		
Diseminasi Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	188,469,186	laporan	109,060,000	laporan	450,000,000	laporan	1,000,000,000	laporan	400,000,000	laporan	400,000,000	laporan	500,000,000		
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	264,950,000	laporan	311,200,000	laporan	350,000,000	laporan	300,000,000	laporan	200,000,000	laporan	200,000,000	laporan	300,000,000		
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	-	laporan	16,800,000	laporan	-	laporan	100,000,000	laporan	100,000,000	laporan	150,000,000	laporan	300,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program Riset dan Inovasi Daerah	1. Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan, 2. Persentase kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah, 3. Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah, 4. Persentase Fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi didaerah.	-	%		%	520,000,000	%	1,100,000,000	%	1,250,000,000	%	1,350,000,000	%	1,900,000,000		
Kegiatan Penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	-	Laporan	-	Laporan	145,000,000	Laporan	600,000,000	Laporan	750,000,000	Laporan	750,000,000	Laporan	1,000,000,000		
Fasilitasi dan pembinaan, pelaksanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	125,000,000	laporan	150,000,000	laporan	150,000,000	laporan	200,000,000		
Koordinasi Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah dalam bentuk Rencana Induk dan Peta Jalan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah	-	dokumen	-	dokumen	-	dokumen	125,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	150,000,000	dokumen	200,000,000		
Penyusunan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	Jumlah Naskah Kebijakan Kebijakan Berbasis Hasil Riset	-	Naskah	-	Naskah	-	Naskah	125,000,000	Naskah	150,000,000	Naskah	150,000,000	Naskah	200,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan.	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	-	Pelatihan	-	Pelatihan	145,000,000	Pelatihan	125,000,000	Pelatihan	150,000,000	Pelatihan	150,000,000	Pelatihan	200,000,000		
Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	-	laporan	-	laporan	-	laporan	100,000,000	laporan	150,000,000	laporan	150,000,000	laporan	200,000,000		
Kegiatan Inovasi dan Inovasi	Jumlah laporan pelaksanaan inovasi dan inovasi	-	Laporan	-	Laporan	375,000,000	Laporan	500,000,000	Laporan	500,000,000	Laporan	600,000,000	Laporan	900,000,000		
Fasilitasi dan Pembinaan untuk apresiasi prestasi inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	-	laporan	-	laporan	250,000,000	laporan	75,000,000	laporan	75,000,000	laporan	95,000,000	laporan	125,000,000		
Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	-	laporan	-	laporan	50,000,000	laporan	75,000,000	laporan	75,000,000	laporan	85,000,000	laporan	125,000,000		
Penyusunan Kebijakan di Bidang Inovasi dan Inovasi	Jumlah Naskah Kebijakan di Bidang Inovasi dan Inovasi	-	Naskah	-	Naskah	-	Naskah	50,000,000	Naskah	50,000,000	Naskah	60,000,000	Naskah	100,000,000		



BIDANG URUSAN/ PROGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET.	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	12 PS	ProSN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan dan pengkajian dan penerapan	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	-	laporan	-	laporan	-	laporan	50,000,000	laporan	50,000,000	laporan	60,000,000	laporan	75,000,000		
Pemantauan dan evaluasi Inovensi dan Inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi Inovensi dan Inovasi	-	laporan	-	laporan	-	laporan	50,000,000	laporan	50,000,000	laporan	60,000,000	laporan	100,000,000		
Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan atau mengatasi permasalahan daerah	-	laporan	-	laporan	-	laporan	50,000,000	laporan	50,000,000	laporan	60,000,000	laporan	100,000,000		
Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan Kebun Raya Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	-	laporan	-	laporan	-	laporan	50,000,000	laporan	50,000,000	laporan	60,000,000	laporan	75,000,000		
Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan untuk penguatan kelembagaan riset dan inovasi di daerah	-	laporan	-	laporan	-	laporan	50,000,000	laporan	50,000,000	laporan	60,000,000	laporan	100,000,000		
Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatn kekayaan intelektual	-	laporan	-	laporan	75,000,000	laporan	50,000,000	laporan	50,000,000	laporan	60,000,000	laporan	100,000,000		

4.4 Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Subkegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program prioritas pembangunan daerah melalui penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan. Subkegiatan yang dilakukan diarahkan untuk menghasilkan basis pengetahuan (knowledge base), rekomendasi kebijakan, serta inovasi yang dapat memperkuat pencapaian outcome dari masing-masing program prioritas.

Adapun uraian subkegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas 100.000 Sultan Muda Sumsel

- **Outcome:**

Mencetak 100.000 wirausaha muda di berbagai sektor, antara lain ekonomi kreatif, pertanian, perdagangan, dan bidang produktif lainnya.

- **Uraian Subkegiatan:**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya terkait peningkatan kapasitas kelompok berbasis pertanian, perkebunan, dan pangan. Hasil riset ini akan digunakan untuk merumuskan strategi penguatan ekosistem kewirausahaan muda yang berbasis inovasi dan teknologi tepat guna.

2. Program Prioritas Pendidikan yang Berkeadilan

- **Outcome:**

Mendukung keberlanjutan program literasi guna meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan.

- **Uraian Subkegiatan:**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kegiatan ini mencakup kajian kebijakan literasi, model pembelajaran inovatif, serta pemanfaatan teknologi digital untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan.

3. Program Prioritas Sumsel Wonderful 2030

- **Outcome:**

Mendukung program pemerintah daerah dalam mengembangkan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan.

- **Uraian Subkegiatan:**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan penelitian dan pengembangan pariwisata, termasuk identifikasi potensi destinasi unggulan, penguatan promosi berbasis digital, serta pengembangan model inovasi pariwisata berkelanjutan.

4. Program Prioritas Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)

- **Outcome:**

Mempertahankan swasembada beras serta meningkatkan produksi pangan lainnya dalam rangka mewujudkan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional.

- **Uraian Subkegiatan:**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian, perkebunan, dan pangan. Kegiatan ini difokuskan pada riset produktivitas, inovasi teknologi budidaya, dan penguatan sistem ketahanan pangan berbasis lokal.

5. Program Prioritas Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak

- **Outcome:**

Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak melalui upaya pencegahan stunting dan mendukung program makanan bergizi gratis (MBG).

- **Uraian Subkegiatan:**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan, khususnya riset terkait stunting, pola konsumsi gizi masyarakat, serta inovasi program intervensi kesehatan yang berbasis eviden.

Melalui pelaksanaan subkegiatan penelitian dan pengembangan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan berfungsi sebagai pusat pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan inovasi. Dengan demikian, keberadaan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera

Selatan tidak hanya berperan dalam memperkuat kapasitas perumusan kebijakan, tetapi juga menjadi motor penggerak lahirnya solusi inovatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.

Sub kegiatan prioritas Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah provinsi sumatera selatan disajikan pada tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	100.000 Sultan Muda Sumsel	Mencetak 100.000 wirausaha Muda Satera Selatan di berbagai sektor (ekonomi kreatif, pertanian, perdagangan dan bidang lainnya	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah / Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Berbasis Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
2	Pendidikan yang berkeadilan	Mendukung melanjutkan program Literasi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Selatan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan / sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
3	Sumsel Wonderfull 2030	Mendukung Program Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan / Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	



No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP)	Mendukung mempertahankan Swasembada beras dan meningkatkan produksi pangan lainnya (Sumsel Lumbung Pangan Nasional)	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan / Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
5	Program Kesejahteraan dan Kesehatan Perempuan dan Anak	Meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak, pencegahan Stunting dan mendukung program makan bergizi gratis (MBG)	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan / Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu **“Sumsel Maju Terus Untuk Semua”**, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan arah pembangunan jangka menengah daerah untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yaitu **Indeks Inovasi Daerah, Indeks Kapabilitas Inovasi dan Persentase Kebijakan Berbasis Bukti** dengan target keberhasilan yang meningkat setiap tahunnya.

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) disajikan pada tabel 4.4 di bawah ini.

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Inovasi Daerah	Skor	76,55	77,31	78,09	78,87	79,66	80,45	
2	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	3,06	
3	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang disusun secara terintegrasi dengan arah kebijakan nasional dan daerah. IKK diturunkan dari indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD, sebagai berikut:

1. Indeks Inovasi Daerah
2. Indeks Kapabilitas Inovasi
3. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
4. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) disajikan pada Tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam Implementasi Pembangunan	Rekomendasi	3	4	4	4	4	4	4	
2	Jumlah Potensi unggulan daerah yang dikembangkan dari inovasi	Dokumen	3	5	5	5	5	5	5	
3	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	
4	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah.	Dokumen	2	6	6	6	6	6	6	
5	Persentase Fasilitas Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan Perkajian dan Penerapan di Daerah	Laporan	4	7	7	7	7	7	7	
6	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	Naskah	0	1	1	1	1	1	1	
7	Persentase kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Naskah	0	1	1	1	1	1	1	



No	Indikator Outcome	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
8	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah	Laporan	0	1	1	1	1	1	1	
9	Persentase Fasilitas, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi didaerah	Laporan	0	11	11	11	11	11	11	
10	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2025–2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Penyusunan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan daerah, tren perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan akan inovasi dalam mendukung peningkatan daya saing daerah. Dokumen ini juga telah mempertimbangkan kondisi faktual Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun tantangan pembangunan di masa depan.

Melalui Renstra ini, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan menetapkan fokus utama pada penguatan riset strategis, pengembangan inovasi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan jejaring kolaborasi riset dan inovasi. Dengan demikian, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu berperan sebagai pusat pengetahuan (knowledge hub) yang memberikan dukungan ilmiah dan inovatif terhadap perumusan kebijakan publik, pengembangan ekonomi daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) BRIDA Provinsi Sumatera Selatan 2025–2029

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan Renstra, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Indeks Inovasi Daerah (IID)

- Mengukur tingkat kinerja inovasi yang dihasilkan pemerintah daerah, baik dalam aspek tata kelola, pelayanan publik, maupun

pembangunan daerah.

- Target capaian diharapkan terus meningkat setiap tahun sehingga menempatkan Provinsi Sumatera Selatan pada kategori Sangat Inovatif.

2. Indeks Kapabilitas Inovasi

- Mengukur kapasitas dan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, serta ekosistem daerah dalam mengembangkan inovasi.
- Indeks ini menjadi tolak ukur kemampuan Provinsi Sumatera Selatan dalam mengintegrasikan riset, teknologi, dan inovasi ke dalam pembangunan daerah.

3. Persentase Kebijakan Berbasis Bukti (Evidence-Based Policy)

- Mengukur proporsi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah yang disusun dan dilaksanakan dengan dukungan hasil kajian, penelitian, dan data ilmiah.
- Peningkatan indikator ini mencerminkan optimalisasi peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang akurat, relevan, dan tepat sasaran.

Selain fokus pada pencapaian indikator kinerja utama, pelaksanaan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan juga wajib memperhatikan kaidah pengarusutamaan pembangunan sebagai prinsip dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi:

1. Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (GESI)

Seluruh program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat marginal.

2. Pembangunan Berkelanjutan

Setiap kebijakan dan inovasi daerah yang dihasilkan harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan, memperhatikan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3. Transformasi Digital

Pemanfaatan teknologi digital akan menjadi pilar utama dalam riset, inovasi, serta tata kelola kebijakan berbasis bukti. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan diharapkan menjadi motor penggerak digital government berbasis data dan riset.

4. Pembangunan Rendah Karbon

Inovasi yang dihasilkan harus berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, efisiensi energi, serta pengembangan ekonomi hijau di tingkat daerah.

5. Pembangunan Berketahanan Iklim

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan berperan strategis dalam menghasilkan riset dan rekomendasi kebijakan yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan sistem ketahanan pangan.

Dengan demikian, Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola riset dan inovasi daerah yang inklusif, berkelanjutan, berbasis digital, rendah karbon, dan berketahanan iklim. Pencapaian tujuan tersebut tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya.

Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman kerja yang operasional, realistis, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan, sehingga implementasinya dapat memberikan kontribusi nyata dengan menjabarkan dan mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Periode 2025-2029 yaitu ***“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”***.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra ini memerlukan komitmen kuat dari seluruh jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan, sinergi dengan perangkat daerah lainnya, serta dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan dukungan tersebut, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan berbasis riset dan inovasi, serta menjawab berbagai tantangan global menuju terwujudnya masyarakat Sumatera Selatan yang sejahtera, berdaya saing, dan berkeadilan.



Lampiran 1 Lampiran Tabel Rincian Komponen Belanja Rancangan Akhir Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2030

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	BELANJA OPERASI	17,817,915,016	24,411,354,000	31,296,123,773	32,534,510,958	33,621,376,874	37,958,739,053	
1.	Belanja Pegawai :	12,841,378,000	18,122,854,000	19,935,139,400	21,922,278,340	24,108,506,172	26,522,356,791	
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7,273,990,000	10,867,330,883	11,954,063,971	13,149,470,368	14,464,417,403	15,910,859,145	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	4,714,308,000	7,186,576,150	7,905,233,765	8,695,757,142	9,565,332,856	10,521,866,142	
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	562,194,000	767,264,341	843,990,775	928,389,853	1,021,228,838	1,123,351,722	
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	261,404,000	430,459,920	473,505,912	520,856,503	572,942,153	630,236,368	
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	500,522,000	746,233,560	820,856,916	902,942,607	993,236,868	1,092,560,555	
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	114,057,000	162,340,200	178,574,220	196,431,642	216,074,806	237,682,287	
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	295,366,000	410,443,935	451,488,328	496,637,161	546,300,877	600,930,965	
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	96,842,000	59,050,620	64,955,682	71,451,250	78,596,375	86,456,013	
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	87,000	61,847	68,032	74,835	82,319	90,551	
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	664,154,000	1,016,449,077	1,118,093,985	1,229,903,384	1,352,893,722	1,488,183,094	
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	10,496,000	14,857,723	16,343,495	17,977,844	19,775,628	21,753,191	
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	31,460,000	44,569,590	49,026,549	53,929,204	59,322,124	65,254,336	



No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	23,100,000	29,023,920	31,926,312	35,118,943	38,630,837	42,493,921	
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	5,567,388,000	7,255,523,117	7,981,075,429	8,772,807,972	9,644,088,769	10,611,497,646	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5,517,388,000	7,118,023,117	7,829,825,429	8,612,807,972	9,474,088,769	10,421,497,646	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	5,517,388,000	7,118,023,117	7,829,825,429	8,612,807,972	9,474,088,769	10,421,497,646	
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	50,000,000	137,500,000	151,250,000	160,000,000	170,000,000	190,000,000	
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah							
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD							
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD							
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN							
	- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang /Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan/Jasa)	50,000,000	137,500,000	151,250,000	160,000,000	170,000,000	190,000,000	
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD							
	3) Belanja Pegawai BOS							
	4) Belanja Pegawai BLUD							



No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD							
	6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH							
2.	Belanja Barang dan Jasa	4,976,537,016	6,288,500,000	11,360,984,373	10,612,232,618	9,512,870,702	11,436,382,262	
3.	Belanja Bunga							
4.	Belanja Subsidi							
5.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	
	1) Hibah Kepada.....							
	2) Hibah Kepada.....							
	3) Hibah Kepada.....							
	4) Hibah Kepada.....							
	5) dst.....							
6.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	
	1) Bantuan Sosial Kepada.....							
	2) Bantuan Sosial Kepada.....							
	3) Bantuan Sosial Kepada.....							
	4) Bantuan Sosial Kepada.....							
	5) dst.....							
II.	BELANJA MODAL	3,289,350,000	1,058,298,314	1,996,528,145	1,758,140,960	1,671,275,044	2,075,000,000	
	a. Belanja Modal Tanah							
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70,500,000	858,298,314	1,776,528,145	1,518,140,960	1,426,275,044	1,775,000,000	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,218,850,000	200,000,000	220,000,000	240,000,000	245,000,000	300,000,000	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi							



No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya							
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud							
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA							
IV.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	
1.	Belanja Bagi Hasil							
2.	Belanja Bantuan Keuangan							
TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)		21,107,265,016	25,469,652,314	33,292,651,918	34,292,651,918	35,292,651,918	40,033,739,053	